

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 6/PR.02/K.BB/06/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025 - 2029

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna pencapaian tujuan dan sasaran strategis lembaga;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 - 2029 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 - 2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
Pada tanggal : 2 Juni 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR

Tembusan Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025	FORMULA
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan	Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	98	Berdasarkan hasil Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Aplikasi SMART Kemenkeu
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	A	Nilai Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil penilaian APIP

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET				KETERANGAN FORMULASI
				2026	2027	2028	2029	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Meningkatnya kualitas instrument dan kegiatan Pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah kegiatan pencegahan yang relevan / Total kegiatan pencegahan yang dilaksanakan) x 100%
			Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah instrumen pencegahan yang disusun dan dinilai relevan / Total instrumen pencegahan yang direncanakan) x 100%
		Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah indikator kualitas yang terpenuhi / Total indikator kualitas pengawasan) x 100%
		Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan	Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu	0	85%	90%	95%	(Jumlah layanan penindakan pelanggaran yang sesuai SOP / Total layanan penindakan pelanggaran yang dilaksanakan) x 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET				KETERANGAN FORMULASI
				2026	2027	2028	2029	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					
			Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%	(Jumlah layanan penindakan pada Sentra Gakkumdu yang sesuai SOP / Total layanan penindakan pada Sentra Gakkumdu) x 100%
		Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%	((Tingkat Pemahaman Penerima Manfaat Setelah Menerima Layanan - Tingkat Pemahaman Penerima Manfaat Sebelum Menerima Layanan) / Tingkat Pemahaman Penerima Manfaat Sebelum Menerima Layanan) x 100%
		Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%	(Jumlah layanan sengketa proses yang sesuai SOP / Total layanan sengketa proses yang dilaksanakan) x 100%
		Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%	((Tingkat Pemahaman Penerima Manfaat Setelah Menerima Layanan - Tingkat Pemahaman Penerima Manfaat Sebelum Menerima Layanan) / Tingkat Pemahaman Penerima Manfaat Sebelum Menerima Layanan) x 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET				KETERANGAN FORMULASI
				2026	2027	2028	2029	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
		Kabupaten/Kota						
		Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%	(Jumlah peserta pemilu dengan pemahaman baik / Total peserta pemilu yang menerima layanan) x 100%
2	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	35 orang	40 orang	45 orang	50 orang	Total kader pengawas yang mengikuti dan lulus pelatihan
		Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	82%	85%	90%	((Jumlah kelompok terakreditasi tahun berjalan - Jumlah tahun sebelumnya) / Jumlah tahun sebelumnya) x 100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah ASN yang mengikuti dan lulus diklat bersertifikasi sesuai jabatan / Total ASN yang dipersyaratkan mengikuti diklat) x 100%
			Persentase Penilaian kinerja	80%	85%	90%	95%	(Jumlah penilaian kinerja yang

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET				KETERANGAN FORMULASI
				2026	2027	2028	2029	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
	pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/	pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota					memenuhi prinsip objektif, transparan, dan terukur / Total penilaian kinerja yang dilakukan) x 100%
			Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu / Total layanan administrasi kepegawaian) x 100%
		Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	(Jumlah laporan tepat waktu dan sesuai standar / Total laporan wajib) x 100%
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah proses pengelolaan keuangan yang selesai sesuai ketentuan / Total proses pengelolaan keuangan) x 100%
			Persentase penyelesaian	100%	100%	100%	100%	(Jumlah pembayaran gaji dan

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET				KETERANGAN FORMULASI
				2026	2027	2028	2029	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
			pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota					tunjangan yang tepat waktu / Total pembayaran gaji dan tunjangan) x 100%
			Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	(Jumlah dokumen RKBMN dan inventarisasi aset yang tersusun lengkap / Total dokumen yang ditargetkan) x 100%
		Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan dan kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola barang dan jasa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Nilai pengadaan melalui e-katalog / Total nilai pengadaan barang/jasa) x 100%
			Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah SDM pengelola barang/jasa yang memiliki sertifikat PBJ / Total SDM pengelola barang/jasa) x 100%
		Meningkatkan sinkronisasi perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, penyelesaian tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP, dan	Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Realisasi volume output RO / Target volume output RO) x 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET				KETERANGAN FORMULASI
				2026	2027	2028	2029	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
		meningkatkan digitalisasi arsip di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota						
		Terpenuhinya pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang memenuhi Kriteria WBK di Bawaslu dan penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah data dukung indikator RB yang tersedia lengkap / Total data dukung yang dipersyaratkan) x 100%
		Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah regulasi yang dievaluasi dan direkomendasikan / Total regulasi target) x 100%
		Meningkatnya layanan Pusdatin terhadap unit kerja lainnya di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah layanan data dan informasi yang terpenuhi sesuai standar / Total permintaan layanan data dan informasi) x 100%
		Meningkatkan layanan peliputan,	Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan	80%	85%	90%	95%	(Jumlah kegiatan yang terdokumentasi dan dipublikasikan sesuai standar /

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET				KETERANGAN FORMULASI
				2026	2027	2028	2029	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
		pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan pemilihan serta penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa yang transparan dan akuntabel di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	pemberitaan kegiatan pemilihan yang transparan dan akuntabel di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota					Total kegiatan yang dilaksanakan) x 100%
			Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah indikator pengelolaan kehumasan yang terpenuhi / Total indikator pengelolaan kehumasan) x 100%

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



LIPI CUSTODY